Nama : Nur Wulan Ris Kilkoda

Nim : 10200120166

Kelas : HTN D

JUDUL

RESUME MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA

A. Pembahasan HTN

1). Peristilahan

- ✓ Droit constitutional (prancis)
- ✓ Staatsrecht (belanda)
- ✓ Constitutional law (inggris)
- ✓ Verfassungsrecht (jerman)
- ✓ Diritto costituzionale (italia)

2). Pengertian

- ✓ Paul scholten (hukum yang mengatur organisasi negara)
- ✓ Van der pot (peraturan badan-badan Yang menentukan hubungan warga negara dan kegiatannya selaku warga negara)
- ✓ Apeldorn (batas kekuasaan yang di miliki pemerintah yang di jalakan dalam bentuk organisasi pemerintah)
- ✓ Prins (dasar-dasar fundamental negara yang menyangkut langsung dengan tiap- tiap warga negaranya pada hal-hal yang penting saja)
- ✓ A.V. Dicey (adalah hukum yang di tuliskan dengan “all rules” yang mana terletak pada pembagian kekuasaan pada negara yang tinggi pada suatu ketatanegaraan)

Dari pengertian hukum tata negara di atas yang di jelaskan oleh para ahli , maka berorientasi pada sisi pemikiran kontekstual dengan kondisi nilai sosiologi, politik, filsafat dan lain-lain. Hukum tata negara Indonesia adalah perangkat hukum baik yang di rumuskan secara tertulis ataupun yang berkembang dalam praktis mencakup organisasi .

Hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai *recht* atau hukum dan apalagi sebagai *wet* atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai *lehre* atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai *verfassungsrecht* (hukum konstitusi) dan sekaligus *verfassungslehre* (teori konstitusi)

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan :

Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak dasarnya.

3). Ruang lingkup kajian

Objek kajian hukum tata negara adalah system pengambilan keputusan dalam negara, dengan demikian pengambilan keputusan tersebut dapat ditemukan dalam hukum tata negara positif seperti dalam undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan tata tertib lembaga-lembaga negara. Sebagai pengetahuan, hukum tata negara sering di pahami sebagai suatu bidang ilmu hukum yang membahas tentang struktur ketatanegaraan dalam arti statis mekanisme, hubungan antara lembaga negara dan hubungan antar warga negara.

Obyek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Dimana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya obyeknya terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:

1. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi)
2. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)
3. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)
4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah)
6. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (peradilan, pemerintahan, perundangan)
7. Wilayah Negara (darat, laut, udara)
8. Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya)
9. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan)
10. Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat)
11. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, Bendera, dan sebagainya)

4). Hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainya

- ✓ HTN dengan ilmu politik : HTN sebagai kerangka tulang –belulang ilmu politik sebagai daging-daging yang melekat padanya, artinya kedua ilmu ini saling berhubungan erat satu sama lainnya.

- ✓ HTN dengan ilmu negara : HTN sebagai norma hukum positif sedangkan ilmu negara sebagai norma hukum positif
- ✓ HTN dan HAN : Menurut Budiman Sinaga, mengenai perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara terdapat banyak pendapat. Secara sederhana, Hukum Tata Negara membahas negara dalam keadaan diam sedangkan Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam keadaan bergerak. Pengertian bergerak di sini memang betul-betul bergerak, misalnya mengenai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan itu harus diserahkan/dikirimkan dari Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang

5). Sumber – sumber Hukum Tata Negara

sumber HTN terbagi 2 (dua), yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, ketika bentuknya menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati

- ✓ Sumber hukum material : Pancasila
- ✓ Sumber hukum formil :
 - UUD dan perundang-undangan
 - Jurisprudensi ketatanegaraan
 - Konvensasi ketatanegaraan
 - Perjanjian internasional tertentu
 - Doktrin ilmu HTN tertentu

Selain sumber hukum materiil dan sumber hukum formal HTN Indonesia, maka berdasarkan pendapat L.J. van Apeldoorn, terdapat pula faktor-faktor yang membantu dalam pembentukan HTN Indonesia, yang terdiri dari perjanjian, yurisprudensi, dan ajaran hukum (communis opinio doctorum) yang memuat ketentuan-ketentuan ketatanegaraan.

- ✓ Sumber HTN Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber hukum materiil, yaitu Pancasila
- 2) Sumber hukum formil, terdiri dari:

a). UUD 1945 (baik Pembukaan maupun Pasal-Pasalnya) dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur/memuat ketentuanketentuan ketatanegaraan, yang terdiri dari:

- UUD 1945 (baik Pembukaan maupun Pasal-Pasalnya).
- Ketetapan MPR/MPRS.

- UU/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang.
- Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Presiden.
- Peraturan Menteri.
- Peraturan Daerah.

b). Konvensi Ketatanegaraan , Apa yang dikemukakan oleh Soepomo sebagai aturan-aturan dasar tidak tertulis tersebut dikenal dengan istilah Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Bagir Manan mengemukakan pengertian Konvensi Ketatanegaraan sebagai berikut: “Konvensi atau (hukum) kebiasaan ketatanegaraan adalah (hukum) yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara, untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan (mendinamisasi), kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan Sebagai contoh dapat dikemukakan konvensi ketatanegaraan yang kemudian diatur dalam undang-undang adalah konvensi pelaksanaan Pidato Kenegaraan Presiden RI dan Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

c).Traktat (Perjanjian Internasional) , Traktat (perjanjian internasional) termasuk dalam bidang Hukum Internasional, namun merupakan sumber hukum formal dari HTN sepanjang perjanjian itu memuat/mengatur ketentuan-ketentuan ketatanegaraan. Perjanjian internasional diatur dalam Pasal 11 UUD 1945. Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi yang harus disahkan dengan undang-undang, dilakukan dengan Keputusan Presiden.

6). Pengertian dan fungsi asas hukum

G.W. Paton, mendefinisikan secara singkat: “a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law “ (asas merupakan pemikiran yang di rumuskan secara luas yang merupakan dasar aturan atau kaidah) . dengan demikian asas itu abstrak , sedangkan kaidah / aturan itu konkrit .

Asas hukum mempunyai fungsi jika merujuk pada pandangan Notohamidjojo (Notohamidjojo: 1975) , fungsi asas dalam kaitan berkerjanya hukum yaitu:

- ✓ Bagi pembentuk undang-undang (legislatur), asas-asas hukum menjadi fondasi atau dasar pembentukan undang-undang. Legislatur perlu meneliti dasar-pikiran dari asas hukum seraya dapat merumuskannya dalam pembentukan undang-undang. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

fungsi asas hukum dalam kaitan dengan sistem hukum, merujuk pandangan Kees Schuit berpendapat bahwa:

- ✓ Fondasi atau landasan dari sistem hukum positif, tatanan asas-asas yang terletak pada landasan (basis) dari bidang hukum tertentu. . Batu uji kritis terhadap sistem hukum positif, berkenaan dengan putusan hakim, asas hukum digunakan tolok ukur

menyeleksi aturan-aturan/ kaidah hukum atas fakta-fakta yang dirumuskan kedalam bahasa yuridis dan juga dalam hal hakim melakukan interpretasi asas-asas hukum berperan.

7). Asas-asas hukum tata negara

menurut Boedisoesetyo bahwa mempelajari asas Hukum Tata Negara sesuatu Negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya yaitu UUD karena dari situlah kemudian ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan bersangkutan.

Asas-asas hukum tata negara yaitu :

1) Asas Pancasila

- Pokok pikiran persatuan
- Pokok pikiran keadilan social
- Pokok pikiran kedaulatan rakyat
- Pokok pikiran ketuhana yang Maha Esa , menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Pancasila sebagai asas , maksudnya ialah setiap negara mempunyai filsafat bangsa. Filsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya.

2) Asas negara hukum

- Rechtstaat / civil law (eropa continental)
 - ❖ Legalitas
 - ❖ Pemisahan kekuasaan
 - ❖ Pengakuan dan perlindungan HAM
 - ❖ Peradilan administrasi
- Rule of law / common law (anglo saxon)
 - ❖ Supremacy of law
 - ❖ Equality before of law
 - ❖ Based on constitution of human right

Rechtstaat dan Rule Of Law berbeda walaupun tidak ada lagi permasalahan di antara keduanya karena kedua konsep mengarah pada sasaran utama yaitu pengakuan dan perlindungan HAM, tetapi berjalan dengan system hukum sendiri .

➤ Rechtstaat

- Lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism sehingga sifatnya revolusioner

- Bertumpu atas system hukum civil law
- Karakter administrative (legalitas)

➤ Rule Of Law

- Berkembang secara evolusioner
- Bertumpu pada system hukum common law
- Karakter judicial (peradilan)

negara hukum Indonesia pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sbb :

“ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “

- Setiap tindakan pemerintahan dan masyarakatnya di dasarkan pada hukum
- Tujuan untuk mencegah kewenangan dan arogansi kekuasaan
- Prinsip “ the rule of law , and not of man “

Jadi Asas Negara Hukum, Yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas Negara hukum (rechtsstaat) cirinya yaitu pertama, adanya UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat.

3) Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi

menurut jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia, mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi politik dan ekonomi

- Gagasan kedaulatan rakyat bersumber dari konsep INTEGRALISTIK
- sebagai lawan dari individualisme dan komunisme Soepomo mengedepankan konsep Integralistik (kekeluargaan) sebagai Cita Negara (Staatsidee) dan sebagai lawan dari individualisme dan komunisme
- MITY Integralistik mengacu dari konsep UNITARY dan bukan UNIFORMITY I
- Gagasan kekeluargaan merupakan ekspresi dari pemikiran “keluarga”
- HAM dalam Konstitusi (Pasal 27, 28, 29 ayat (2), 30 ayat (1), 31 ayat (1) dan 34
- Setelah Amandemen UUD 1945 ada penambahan BAB XA Pasal 28A s/d 28J S
- Penambahan HAM bukan karena isu global tetapi sebagai syarat utama konsep negara hukum untuk mengukur tingkat peradaban, demokrasi dan kemajuan negara.
- Sebelum Amandemen UUD 1945:

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”

Konsep ini melahirkan kedaulatan negara yang totaliter/otoritarian

- Setelah Amandemen

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD” “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”

- Kedaulatan Tuhan (Alinea III dan Pasal 29 ayat (1))

Asas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan pada akhirnya pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui wakil rakyat

4) Asas negara kesatuan

Adalah asas yang menjamin kesatuan pada masyarakat tanpa adanya perselisihan, sehingga terciptanya rasa aman tanpa ada khawatir adanya diskriminasi. Asas ini pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang menyebabkan adanya tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan kewenangan dan pengawasan

- Pasal 1 ayat (1) UUD 1945: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”
- Konsep Central Government dan tidak dibagi Local Government
- Pasal 18, 18A, 18B UUD 1945: Indonesia menganut Prinsip Desentralisasi
- Pasal 37 ayat (5) UUD 1945: NKRI tidak dapat diubah
- Konsep UNITARY but not UNIFORMITY Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity)
- Pasal 1 ayat (1) UUD 1945:

~ NKRI - bentuk negara

~ Republik - bentuk pemerintahan

5) Asas Pemisahan Kekuasaan & Checks and Balances

Yang berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya. Beberapa bagian seperti dikemukakan oleh *John Locke* yaitu :

- Kekuasaan Legislatif
- Kekuasaan Eksekutif
- Kekuasaan Federatif

Montesquieu mengemukakan bahwa setiap Negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu *Trias Politica*

- Eksekutif
- Legislatif
- Yudikatif

- Terjadinya krisis di Indonesia karena ketidakjelasan konsep Checks and Balances dalam UUD 1945 (Sebelum Amandemen)
- Diawali dengan Executive Heavy karena konsep “concentration of power and responsibility upon the president”

Tujuan checks and balances adalah memaksimalkan fungsi masing-masing lembaga negara dan membatasi kesewenangwenangan lembaga negara.

8). Sejarah ketatanegaraan Indonesia

Dalam perjalanan ketatanegaraan, Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar. Mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950, kembalinya UUD 1945 dan sampai dengan UUD 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002.

1) Perubahan Sistem Pemerintahan Negara

- Konstitusi Indonesia merupakan revolutie grondwet yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI dengan nama “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”
- UUD 1945 bersifat singkat dan supel, dan penyelenggaraan aturan-aturan pokok diserahkan pada UU. UUD 1945 bersifat singkat dan supel, dan penyelenggaraan aturan-aturan pokok diserahkan pada UU.
- Sistem pemerintahan negara dilaksanakan berdasarkan pasal peralihan dan bukannya pasal-pasal dalam UUD.

Contoh:

- Presiden & Wapres dipilih oleh PPKI (semestinya MPR)
- Sistem pemerintahan Presidensial, tetapi dibentuk KNIP (Maklumat Pres No. X), Wapres dan Menteri sebagai Pembantu Presiden (muncul sistem Parlementer)

2) Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Ada 4 macam Konstitusi, yaitu:

- UUD 1945 (17/08/1945 s/d 27/12/1949)
- Konstitusi RIS (27/12/1949 s/d 17/08/1950)
- UUDS 1950 (17/08/1950 s/d 05/07/1959)
- UUD 1945 (05/07/1959 s/d 1999-2002)
- UUD 1945 (1999-2002 sampai sekarang)

3) Reformasi & Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan alasan:

- Filosofis, UUD merupakan moment opname dari berbagai kekuatan politik & ekonomi saat itu dan UUD disusun oleh manusia yang tidak pernah berada pada tingkat kesempurnaan.
- Historis, UUD bersifat semetara
- kondisi pembentukan UUD berbeda antara founding fathers dan kekinian.

Kelemahan UUD 1945:

- Executive Heavy tanpa adanya checks and balances
- bahkan multi tafsir Ketentuan UUD 1945 sebagian besar bersifat sangat sederhana, umum bahkan multi tafsir
- Unsur-unsur konstitusionalisme tidak dielaborasi secara memadai dalam UUD 1945
- UUD 1945 terlalu menekankan semangat penyelenggaraan negara U
- UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan yang terlalu besar kepada Presiden
- Banyak materi muatan yang penting justru diatur dalam Penjelasan UUD 1945

Kesepakatan Pembahasan Amandemen UUD

- Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- Tetap mempertahankan NKRI
- Mempertegas sistem Presidensial
- Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dan Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal

4) System ketatanegaraan pada demokrasi liberar tahun 1950-1959

Sistem Politik pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia pada tahun 1950-1959 mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Hal ini dikarenakan menganut sistem multipartai atau lebih dari satu partai yang mencoba untuk silih berganti dalam memperoleh kekuasaan eksekutif maupun legislative. Di Indonesia, sistem politik liberal berjalan kurang lebih 9 tahun dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Akan tetapi pada waktu yang singkat itu Indonesia telah 7 kali pergantian kabinet yang memerintah antara lain :

- Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951),
- Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952),
- Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953),
- Kabinet Ali Satromidjojo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955),
- Kabinet Burharuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956),
- Kabinet Ali Satromidjojo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957),
- Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959).

Sistem pemerintahan yang dikehendaki pada masa demokrasi liberal menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 adalah sistem parlementer, dimana

dalam hal ini kabinet tidak bertanggung jawab kepada Presiden seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sistem parlementer pada masa demokrasi liberal ini Presiden dan Wakil Presiden hanyalah sebagai simbol yang tidak memiliki fungsi pemerintahan sehari-hari. Namun, Presiden tetap dapat menyetujui perdana menteri baru atau tetap dapat mengeluarkan dekrit.

9). Konstitusi sebagai objek kajian HTN

Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang mengkonstruksikan bangunan sebuah negara termasuk aturan-aturan fundamental dalam kehidupan bernegara, Dari perspektif keberlakuannya, secara khusus dipandang dari keberlakuan secara Yuridis dalam lingkup positivisme Keberadaan Konstitusi baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis menjadi landasan dari setiap produk hukum yang ada. Konstitusi sebagai salah satu bentuk dari pada hukum, pada hakikatnya adalah aturan yang statis walaupun memiliki sifat yang fleksibel dan dapat mengakomodir kebutuhan akan penciptaan norma hukum dibawahnya seperti Undang-Undang hukum.

- konstitusionalisme mengandung dua esensi :
 - Konsep Negara Hukum
 - Jaminan HAM
- Hakikat Konstitusionalisme, bahwa setiap kekuasaan harus dibatasi maksudnya adalah Tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan tanpa batas
- Konstitusi berasal dari kata CONSTITUER berarti MEMBENTUK
- Konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara
- Menurut Black Law Dictionary Konstitusi adalah hukum dasar dan organik dari suatu negara dalam menetapkan konsep, karakter, dan organisasi dari pemerintahannya, juga menjelaskan kekuasaan kedaulatannya serta cara dari pengujiannya
- Menurut Heller Lassale, Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah merupakan UUD & Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat
- Menurut Bryce, Strong & Wheare, Konstitusi & UUD adalah sama sebagai dokumen tertulis dalam suatu negara

1) Klasifikasi konsistusi

- Written Constitution and Unwritten Constitution
- Flexible Constitution and Rigid Constitution
- Supreme Constitution and Not Supreme Constitution
- Unitary Constitution and Federal Constitution
- Presidential Executive Constitution and Parliamentary Executive Constitution

2) Nilai konstitusi

- Nilai Normatif

Konstitusi berlaku tidak saja dalam arti hukum melainkan juga realitas

- Nilai Nominal

Konstitusi menurut hukum masih berlaku tetapi dalam kenyataannya tidak sempurna/tidak dilaksanakan

- Nilai Semantik

Konstitusi memang berlaku tetapi hanya sekedar untuk memberi bentuk untuk kekuasaan politik

3) Perubahan konsistusi

Perubahan / amandemen UUD tidak saja berarti menjadi lain isi serta bunyi ketentuan UUD, tetapi juga mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuanketentuan yang sebelumnya tidak terdapat di dalamnya

Istilah-istilah Perubahan Konstitusi :

- Amandement (perubahan)
- Revision (perbaikan)
- Alteration (pergantian)
- Reform (perbaikan)
- Change (pergantian)
- Modified (modifikasi)
- Review (tinjauan)

System perubahan konstitusi :

- Renewal (pembaharuan)

Suatu konstitusi dilakukan perubahan (pembaharuan), maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru Suatu konstitusi dilakukan perubahan (pembaharuan), maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru

- Amandement (perubahan)

laku Apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku

- Perubahan secara RIGID or FLEXIBLE

Prosedur perubahan :

- Lembaga Legislatif dengan pembatasan-pembatasan tertentu (dihadiri sejumlah anggota tertentu, dibubarkan lalu bentuk yang baru, gabungan dua lembaga legislatif)
- Rakyat melalui Referendum
- Sebagian besar negara bagian
- Suatu badan khusus

10). Organ dan fungsi kekuasaan negara

Di Indonesia sendiri terdapat salah satu unsur negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni adanya sistem konstitusi. Konsep penting dari negara hukum yang menjadi prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan ialah adanya pemisahan kekuasaan.¹⁰ Kekuasaan negara terbagi kedalam cabang-cabang khusus berdasarkan pada jenis-jenis kekuasaan dengan ketentuan masing-masing kekuasaan dijalankan oleh lembaga negara tersendiri.

Terdapat perbedaan dari kedua pendapat tersebut. Perbedaan ditunjukkan pada kategorisasi cabang kekuasaan. John Locke mengklasifikasikan kekuasaan yudikatif kedalam kekuasaan eksekutif. Sedangkan, Montesquie mengklasifikasikan kekuasaan federatif kedalam kekuasaan eksekutif dan memandang kekuasaan yudikatif harus berdiri sendiri terpisah dengan kekuasaan lain

1) Lembaga Negara menurut pembagian kekuasaan:

- Eksekutif (Executive), Legislatif (Legislative) dan Yudisial (Judicial)
 - a) Lembaga kekuasaan eksekutif (lembaga pelaksana uud, di jalakan oleh presiden dan wakil . Presiden juga memiliki fungsi sebagai pembentuk undang-undang meskipun bukan pemegang utama. Hal ini tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945)
 - b) Lembaga kekuasaan legislative (Lembaga ini sangat berperan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan sebagai penopang tiang demokrasi, kekuasaan legislatif juga memiliki fungsi sebagai penyerap aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan aspirasi rakyat dalam proses pembentukan undangundang guna memberikan koridor dalam penyelenggaraan negara)
 - c) Kekuasaan Yudisial (Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan menyelenggarakan proses peradilan, Proses peradilan yang dijalankan oleh yudikatif ialah proses peradilan yang mandiri bebas campur tangan kekuasaan manapun)